



Pencerahan Publik Membangun Media

Sari F Nainggolan

TANGGAL 24 Agustus 2008 kemarin, Televisi Republik Indonesia (TVRI) tepat berusia 46 tahun. Sebuah perjalanan usia cukup panjang, sebagai institusi media yang hampir seluruh perjalanannya berada di bawah koordinasi lembaga pemerintah setingkat departemen. Yakni Departemen Penerangan.

Oleh karena itu menjadi wajar bila ada kesan yang terbangun di masyarakat, bahwa TVRI merupakan TV pemerintah.

Ini mengingat pula bahwa sebelum terjadi perubahan bentuk kelembagaan berdasarkan UU No 32 tahun 2002, seluruh mata anggaran TVRI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian integral dari institusi Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Kini setelah UU Penyiaran diberlakukan, TVRI berubah format kelembagaan menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), maka sejumlah konsekuensi mengikuti perubahan tersebut.

Di bidang anggaran sudah pasti. Lebih-lebih kita tahu bahwa di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan tempat berangungnya TVRI dilikuidasi (baca: dibubarkan) bersama dengan Departemen Sosial. Hal ini berpengaruh besar terhadap perjalanan penataan TVRI sebagai sebuah institusi, yang memiliki beban kelembagaan besar.

Sehingga ketika UU mengamanatkan hadirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, ketentuan ini tidak serta merta diikuti perubahan secara cepat oleh TVRI.

Seperti kita tahu bahwa melalui Lembaga Penyiaran Publik, selain kepada TVRI dituntut untuk independen dan netral, satu tanggung jawab yang besar di bidang pencerahan, pendidikan dan penyebarluasan nilai-nilai budaya kita sebagai bangsa.

Ini tentu tidak mudah. Mengingat amanat perubahan format kelembagaan yang disertai peran dan fungsi baru tersebut, berlangsung di tengah persaingan industri televisi yang tumbuh bak jamur di musim hujan.

Inilah tantangan sekaligus problem ganda yang datang sekaligus terhadap TVRI. Secara internal proses perubahan dituntut untuk segera diselesaikan.

Secara internal sedang berlangsung pertarungan terbuka yang mensyaratkan TVRI mesti mampu memproduksi tayangan-tayangan alternatif agar tidak ditinggalkan pemirsa.

TVRI Jogjakarta

Bagi TVRI daerah, persoalan yang mengiringi berbagai perubahan tersebut tentu dirasakan menjadi beban tidak ringan. Sebab untuk menyelamatkan keberadaannya saja, di sejumlah daerah terpaksa harus melakukan efisiensi dan improvisasi *budgeting*. Bahkan beberapa stasiun TVRI daerah kini hampir tidak mampu memproduksi lagi.

Dibanding stasiun lain, beruntung bagi TVRI Jogjakarta. Selain keberadaannya persis di wilayah yang memiliki potensi sosial sangat besar,

Di bidang anggaran produksi, upaya membangun kemitraan dengan dukungan DPRD dan pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, melalui paket-paket tayangan yang difasilitasi oleh dinas-dinas teknis, setidaknya TVRI mampu menampilkan acara-acara yang banyak diminati masyarakat.

TVRI Jogjakarta mampu secara bertahap mengembangkan sistem pengelolaan manajemen, memaksimalkan peran dan fungsi baru, sekaligus memobilisasi sumber dukungan yang hari ini menjadi faktor bagi intensitas kehadirannya.

Di bidang anggaran produksi, upaya membangun kemitraan dengan dukungan DPRD dan pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, melalui paket-paket tayangan yang difasilitasi oleh dinas-dinas teknis, setidaknya TVRI mampu menampilkan acara-acara yang banyak diminati masyarakat.

Dengan dukungan anggaran dari APBD, di mana Legislatif dan Pemerintah di DIY juga memiliki kepentingan di bidang sosialisasi, penjangkaran aspirasi hingga sebetulnya report atas capaian pembangunan kepada masyarakat. Para pekerja TVRI kemudian mengemasnya menjadi paket tayangan yang informatif, mencerdaskan dan menghibur.

Sebuah prinsip tayangan media televisi yang

mencoba secara maksimal dihadirkan oleh TVRI Jogjakarta.

Di luar itu, kepentingan-kepentingan yang selama ini dijabatani oleh TVRI dari kalangan Perguruan Tinggi, Unit-unit usaha dan industri di daerah, Institusi Penegakan Hukum, hingga program-program lembaga publik lainnya seperti KPU. Dengan mengkompromikan secara cerdas antara pesan dan tuntutan kualitas penyiaran.

Acara-acara seperti Plengkung Gading, Bangsal Kepatihan, Obrolan Angkring, Selokan Mataram, Dari Lereng Merapi, *Coffee Breaks*, Koes Ploes Kembali, *Feature's* Kebudayaan, Di Kaki Bukit Menoreh, Resonansi, Pangkur Jenggleng, Taman Gabusan, Siaran Ketoprak dan Wayang Kulit, hingga program-program insidental lainnya, merupakan gambaran dari skema kemitraan tadi.

Yang menarik dicatat adalah, barangkali skema seperti pengalaman TVRI Jogjakarta dalam menjembatani berbagai kepentingan, dengan tetap mengedepankan kualitas penyiaran, merupakan agenda yang secara embrional dapat dibakukan menjadi pola dukungan bagi Lembaga Penyiaran Publik.

Di samping itu keprihatinan terhadap membajirnya tayangan televisi yang tidak berpijak pada nilai dan budaya bangsa, tentunya menjadi tanggung jawab siapapun yang tidak ingin generasi pemirsa televisi hanya disuguhi tayangan-tayangan tidak mendidik.

Oleh karena itu dengan dukungan berbagai pihak yang menaruh keprihatinan yang sama terhadap peran TVRI sebagai media penjaga nilai, TVRI Jogjakarta telah secara maksimal berupaya agar seluruh tayangan yang diproduksi mempertimbangkan, mengacu dan mengangkat semangat lokalitas dan visi budaya yang membawa pencerahan.

Harapan ke depan, jalinan dan dukungan pihak-pihak di luar TVRI yang telah ikut membesarkan TVRI Jogjakarta hingga hari ini, memudahkan menjadi acuan yang secara konkret menunjuk pada upaya pencarian model bagaimana keterlibatan publik sebagai prasyarat hadirnya Lembaga Penyiaran Publik.

Dirgahayu TVRI □ - o. (6242-2008).

**) Dra Sari F Nainggolan,
Programme Director TVRI serta
Pengajar Mata Kuliah Penyutradaraan
Televisi di MMTC dan ISI Yogyakarta.*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Wakil Walikota			
3. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005